

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara baik negara maju maupun yang sedang berkembang termasuk Indonesia tentunya memerlukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah demi mengoptimalkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia yang terdiri atas beragam provinsi dan kabupaten/kota. Keanekaragaman daerah di Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dalam mengkoordinasi pemerintah yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan dan penataan pemerintahan, kebijakan sentralisasi diubah menjadi desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi ini adalah implementasi otonomi daerah.

Otonomi daerah diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi ekonomi dan tantangan di setiap daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan di wilayahnya sendiri. Tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempermudah pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya keuangan dengan efektif terutama dalam mendukung kebutuhan pembangunan

ekonomian lokal.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislative yaitu DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019).

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD yang berarti besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. (Kuncoro, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah secara hukum, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya yang sah, yang digunakan untuk mendanai kegiatan dalam kerangka otonomi daerah sebagai wujud dari prinsip desentralisasi. Peran PAD sangat penting dalam membiayai pembangunan daerah karena mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap perekonomian daerah, semakin besar kemampuan daerah tersebut dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004



erimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan PAD terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Peraturan BPK, 2004).

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, salah satu kota terbesar di Indonesia dan sebagai kota metropolitan yang pertumbuhan ekonominya cenderung stabil. Mengukur kinerja keuangan sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar kinerja keuangan Kota Makassar dalam meningkatkan potensi Kota Makassar. Salah satu variabel pengukuran kinerja keuangan daerah yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal yang merupakan rasio yang mampu menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan dengan menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. (Kartika, D. & Kusuma, I. C., 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Dahliah Baharuddin (2022) mengemukakan hasil penelitiannya yaitu bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan daerah sebagai komponen APBD Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan 2019 mencapai rata-rata 27,75% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah tahun 2020. Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 32,44%, tahun 2021 sebesar 34,66%, tahun 2022 sebesar 39,31%, dan tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 38,72%. Melalui fenomena atas kontribusi PAD pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dalam menunjang APBD



Makassar masih relatif rendah. Selain itu, meskipun ekonomi Kota Makassar cenderung stabil, akan tetapi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

seringkali belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga akan disajikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang dapat ditunjukkan melalui tabel 1.1. yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2004-2023 (Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	
	Target	Realisasi
2004	84.179.962.330	99.953.791.000
2005	100.532.061.960	120.641.782.818
2006	114.775.532,315	139.875.863.930
2007	125.936.173,075	141.554.869.939
2008	145.466.209.400	158.131.371.957
2009	171.160.106.000	168.703.721.874
2010	197.876.432.000	210.145.729.430
2011	211.324.452.321	345.350.562.825
2012	441.234.952.000	484.972.799.508
2013	563.891.202.000	621.247.679.844
2014	608.960.000.000	730.988.641.341
2015	992.150.000.000	828.871.852.780
2016	1.305.180.000.000	971.859.753.606
2017	1.332.550.000.000	1.337.231.047.257
2018	1.483.710.000.000	1.185.453.010.989
2019	1.649.400.000.000	1.303.316.431.493
2020	1.749.400.000.000	1.078.328.561.270
2021	1.686.390.000.000	1.139.438.031.610
2022	2.014.710.000.000	1.410.813.774.030
2023	2.360.630.000.000	1.568.234.972.320

umber data : Kementrian Keuangan RI 2024



Dari data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Makassar beberapa kali masih belum memenuhi target. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah sebagai salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah serta kurang efektifnya upaya penagihan pajak daerah kepada masyarakat. Selain itu, berdasarkan tabel juga dapat diketahui bahwa efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar bersifat fluktuatif seperti pada tahun 2015, efektivitas penerimaan PAD Kota Makassar sebesar 83%, tahun selanjutnya turun menjadi 74%, lalu pada tahun 2017 sebesar 100%, kemudian kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 79%, juga pada tahun 2020 semakin menurun hingga 61%, pada tahun 2021 sebesar 67%, kemudian meningkat hingga 70% pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023 yaitu sebesar 66%. Hal ini tidak terlepas dari peranan beberapa faktor yang ikut menentukan naik dan turunnya nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi ekonomi suatu wilayah dapat diamati dari beberapa indikator ekonomi makro, yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Salah satu indikator makro yang digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menjelaskan kemampuan daerah dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya, sehingga nilai besaran PDRB di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan potensi yang terdapat di daerah itu. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah, dapat

oleh besaran PDRB yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang jasa sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi disuatu



daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu. PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di suatu daerah berjalan dengan baik, yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan PAD dari berbagai sektor. Kota Makassar memiliki sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, restoran, dan hotel. Pertumbuhan di sektor-sektor ini secara langsung berkontribusi terhadap PDRB. Ketika PDRB meningkat, maka kemungkinan besar akan ada peningkatan dalam pajak yang dipungut dari individu dan perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan PAD secara langsung meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan tingkat pendapatan perkapita yang tinggi dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD.

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertambahan penduduk tidak hanya dianggap sebagai masalah, tetapi juga sebagai elemen penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Besarnya PAD dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yakni jika jumlah penduduk meningkat maka semakin besar potensi pendapatan yang dapat dipungut dari masyarakat.

Faktor lain yang mempengaruhi PAD adalah inflasi. Adanya aktifitas penduduk berkontribusi pada dinamika ekonomi secara keseluruhan yang dapat menciptakan permintaan berlebih atas barang dan jasa yang disebut dengan inflasi. Adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktifitas

mian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan



memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah seperti halnya penelitian Muchtholifah (2010).

Adanya inflasi di daerah menggambarkan adanya gejala ekonomi yang apabila dibiarkan tanpa dikendalikan akan merusak perekonomian karena inflasi yang baik kurang dari 10% apabila inflasi melebihi dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar rupiah yang akan semakin menurun. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun karena harga-harga barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pendapatan riil. Hal ini dapat mengurangi konsumsi yang berimplikasi pada penurunan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dari sektor-sektor seperti pajak restoran dan pajak hotel. Dengan begitu, Pendapatan Asli Daerah akan berkurang karena penurunan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatannya. Kenaikan inflasi dapat menyebabkan penurunan PAD karena berkurangnya konsumsi masyarakat dan dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengendalian inflasi penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah. (Indra et. al, 2017).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayza pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh". Hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05 sedangkan dari Uji t menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD. Penelitian lainnya

kukan oleh Sane Bembok pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang "Analisis faktor faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di



Kabupaten Tolikara”. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama penelitian dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi ganda (R^2) diperoleh, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis melakukan penelitian tentang **“Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar tahun 2004-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?
2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membina otonomi daerah khususnya di Kota Makassar.

2. Manfaat Akademis:

Mampu memberikan literatur penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan PAD meliputi berbagai pos penerimaan pajak seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil Perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lainnya yang sah. (Mardiasmo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah, baik melalui sektor pajak, retribusi, atau hasil daerah yang sah dan digunakan untuk mendanai Pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal (1) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Suhanda (2007:156) dalam bukunya mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah.



i beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah,

retribusi daerah, serta hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah berfungsi untuk memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam mengelola anggaran dan mewujudkan otonomi daerah.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk di wilayahnya tanpa memberikan imbalan langsung dari pemerintah yang memungutnya. Pajak daerah merupakan kebijakan yang diterapkan secara paksa oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung sesuai hukum. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan daerah seperti ekspansi lapangan kerja, Pembangunan infrastruktur, dan proyek Pembangunan lainnya. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019)

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung layanan langsung atau sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan dari retribusi daerah dan pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk memelihara otonomi daerah dengan harapan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang nyata. Lalu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja

APBD). Apabila pengelolaan tersebut menghasilkan keuntungan maka menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis hasil pengelolaan



kekayaan yang dipisahkan meliputi laba Perusahaan milik daerah, laba Lembaga keuangan bank dan non-bank, serta laba dari penyertaan modal atau investasi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019)

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber-sumber lain selain pajak dan retribusi, seperti hasil penjualan aset dan bahan jasa, bunga dari simpanan bank dan giro, serta denda dari kontraktor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggolongkan yang termasuk bagian dari pendapatan lain-lain yang sah meliputi; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai. Namun, sumber pendapatan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri, artinya semakin besar potensi pendapatan asli daerah lainnya yang sah maka semakin besar pula pendapatan daerah tersebut. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam belanja modal pemerintah daerah sehingga pelayanan public menjadi lebih baik. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019)

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh PDRB atas dasar harga



pasar. (BPS,2022). Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah baik yang dilakukan oleh penduduk daerahmaupun penduduk dari daerah lain yang bermukin di daerah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai pasar seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah atau provinsi dalam periode satu tahun tertentu. PDRB terbagi menjadi dua kategori yaitu PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitng oleh harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Sedangkan PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitng dengan harga nilai saat ini. (Badan Pusat Statistik, 2022). Penelitian ini berfokus pada PDRB berdasarkan harga konstan yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan dihitng dengan menggunakan harga tahun dasar.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih mengarah pada perubahan yang bersifat kuantitatif yaitu bisa diukur menggunakan data PDB (Produk Domestik Bruto) atau nilai pasar akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi dalam periode waktu tertentu. PDRB juga dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi secara nominal. PDRB memiliki berbagai kegunaan, namun yang utama adalah untuk menilai kinerja ekonomi secara keseluruhan. (Susanto. I, 2014)

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan



sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Semakin besar nilai PDRB suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonominya yang mencerminkan kemajuan perekonomian daerah tersebut. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat terjadi ketika faktor-faktor endogen (dari dalam daerah) dan eksogen (dari luar daerah) saling berinteraksi dan berkolaborasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro. (Afrizal, 2013).

Menurut BPS, data PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah tiap tahunnya. Data PDRB ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain; PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang tinggi mencerminkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitupun sebaliknya. Kemudian PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri berperan penting dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah. Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per individu atau per satu orang penduduk di suatu daerah. Sedangkan



er kapita atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengetahui
ihan ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.4 Landasan Teori PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. (Rahardjo Adisasmita, 2013:4).

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu; luas tanah, jumlah penduduk, jumlah barang dan modal, dan teknologi yang digunakan. Menurut Smith dalam Arsyad (2015) unsur pokok dari sistem produksi suatu negara bergantung pada faktor-faktor berikut:

- a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian
- b. Sumber daya manusia (jumlah penduduk dan tenaga kerja) merupakan peran positif proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
- c. Akumulasi modal yang dimiliki memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Stok modal dapat diidentikan sebagai dana



Pembangunan dimana cepat lambatnya Pembangunan ekonomi tergantung pada dana Pembangunan tersebut.

Menurut Sukirno (2017), laju pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana misalnya melalui Pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik.

PDRB Konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wisemen (dalam Mangkosoebroto, 2010;173) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

2.1.5 Jumlah Penduduk

Dalam teori penduduk, *Thomas Robert Malthus* menyatakan bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah persediaan bahan pangan yang dibutuhkan sehingga *Malthus* sangat prihatin karena waktu yang dibutuhkan untuk jumlah penduduk untuk berlipat ganda sangat singkat. *Malthus* menggambarkan jika tidak ada pembatasan, populasi cenderung berkembang secara eksponensial. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan persediaan bahan pangan. Dalam waktu 200 tahun, perbandingan ini akan mencapai 256 : 9 (Mantra, 2000).

Namun, pandangan *Malthus* ditentang oleh *Michael Thomas Sadler* yang



ipat bahwa daya produksi manusia dibatasi oleh kepadatan penduduk. umlah penduduk yang tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun, a kepadatan penduduk yang rendah dapat meningkatkan daya

reproduksi. *Doubleday* juga mengemukakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding berbalik dengan ketersediaan bahan makanan (Mantra, 2000).

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diperoleh dari mereka juga akan meningkat (Simanjuntak, 2001).

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk, yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu; *Positive checks* atau kejadian yang berada diluar kekuasaan manusia seperti, bencana alam, kelaparan, penyakit menular, perang dan pembunuhan. *Presentive checks* atau hal yang bisa diusahakan oleh sendiri seperti, menunda perkawinan atau pernikahan atau hidup selibat permanen (*Malthus*, 2010).

2.1.6 Teori Pertumbuhan Endogenous

Teori pertumbuhan endogenous merupakan teori yang membahas tentang konsep modal manusia dalam mempengaruhi pertumbuhan. Lucas (1988) dan Romer (1986) merupakan peneliti pertama yang membangun model hubungan bahwa modal manusia merupakan komponen penting dalam teori pertumbuhan endogenous (endogenous growth theory). Model pertumbuhan endogen menekankan bahwa modal manusia dan penelitian dan pengembangan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Juhro & Trisnanto, 2021). Dalam teori ini, pertumbuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sumber daya alam atau teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti dalam sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan



Teori pertumbuhan endogenous menyimpulkan bahwa investasi terhadap modal fisik dan modal manusia memiliki peran dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang serta mendorong peran aktif dari kebijakan publik dalam memacu pembangunan ekonomi melalui investasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia (Sunusi et al., 2014). Dengan kata lain, faktor-faktor internal ini dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang tidak terbatas, dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut selama sumber daya manusia dan pengetahuan terus berkembang.

Teori pertumbuhan ekonomi endogenous ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, termasuk jumlah penduduk. Dengan populasi yang lebih besar, daerah memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, inovasi, dan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD melalui peningkatan basis pajak dan pendapatan dari kegiatan ekonomi lokal. (Juhro & Trisnanto, 2021).

2.1.7 Inflasi

Inflasi didefinisikan dengan berbagai cara dalam literatur ekonomi. Keanekaragaman dari definisi inflasi ini pun terjadi karena adanya berbagai hubungan yang sangat erat antara inflasi dengan berbagai sektor ekonomi sehingga hal ini mengakibatkan munculnya berbagai pandangan dan pemahaman mengenai inflasi termasuk cara mengatasi masalah yang disebabkan oleh adanya inflasi. Secara umum, inflasi merupakan kenaikan harga yang terjadi secara luas dan berkelanjutan terkait dengan adanya mekanisme pasar. Inflasi menjadi

a dan tantangan ekonomi bagi seluruh negara karena penurunan daya



beli masyarakat akan diikuti dengan penurunan nilai riil mata uang negara. (Susanto. I, 2014).

Para ekonom mendefinisikan inflasi secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semuanya merujuk pada kenaikan harga yang terus-menerus. Inflasi mencerminkan kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dianggap sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas ke sebagian besar dari harga barang lainnya. Kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar), atau kejadian yang bersifat sementara tidak dianggap inflasi. (Susanto. I, 2014).

Inflasi sering digunakan sebagai ukuran aktivitas ekonomi untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Berikut beberapa definisi inflasi; Sukirno (2017) mendefinisikan inflasi sebagai: "Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus". Fahmi (2014) menyatakan bahwa inflasi adalah: "Suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi di mana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan". Natsir (2014) menyebut inflasi sebagai: "Kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus".

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Sementara kenaikan harga hanya pada satu atau dua barang saja tidak dianggap inflasi kecuali jika kenaikan tersebut meluas pada barang lainnya.

Inflasi tidak terjadi secara spontan melainkan dapat dipicu oleh beberapa faktor. Beberapa hal yang dapat menyebabkan inflasi yaitu yang pertama adalah

tan permintaan (*demand*). inflasi dapat terjadi karena meningkatnya an dari masyarakat terhadap barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan



melebihi pasokan yang tersedia menyebabkan barang bisa menjadi langka di pasaran. Hal ini dapat terjadi baik dari permintaan dalam negeri maupun dari permintaan untuk ekspor. Selain itu, peningkatan permintaan dari pemerintah dan sektor swasta juga dapat memicu terjadinya inflasi.

Tingginya peredaran uang juga dapat menyebabkan inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia. Ketika terlalu banyak uang beredar sementara pasokan barang relative tetap, maka harga barang cenderung naik sebagai respons terhadap permintaan yang tinggi dibandingkan dengan penawaran yang terbatas. Ketidakseimbangan antara arus jumlah barang dan uang yang beredar di masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Itulah alasan mengapa pemerintah tidak semata-mata mencetak uang yang banyak untuk melunasi hutang negara dan lain-lain. Karena saat jumlah uang yang beredar lebih banyak maka dapat menyebabkan terjadinya inflasi di negara tersebut.

Inflasi memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara seperti; Inflasi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dengan menurunnya daya beli, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran mereka. Mengingat bahwa konsumsi masyarakat merupakan penggerak ekonomi Indonesia, pengurangan belanja ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Inflasi juga merugikan konsumen karena meskipun pendapatan mungkin tetap sama, namun pengeluaran meningkat akibat kenaikan harga barang dan jasa yang diperlukan. Inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. dengan meningkatnya biaya ekspor, produk ekspor menjadi kurang kompetitif yang pada akhirnya pemasukan

menjadi berkurang. Inflasi juga dapat menurunkan minat masyarakat untuk menabung di bank. Hal ini disebabkan oleh bunga Tabungan yang kecil tidak



mampu mengimbangi dampak inflasi, ditambah biaya administrasi bulanan yang mengurangi bunga yang diterima nasabah. Inflasi berpotensi mempengaruhi kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan kurs rupiah mencakup dua aspek, yaitu stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, serta stabilitas nilai mata uang terhadap mata uang negara lain yang berkaitan dengan pergerakan kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Dalam mengatasi laju inflasi, pemerintah dan BI biasanya menetapkan target tahunan. Otoritas fiskal dan moneter bekerja sama dalam mengendalikan inflasi dengan berbagai strategi, seperti sinergi 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi komunikasi. Strategi lainnya seperti adaptasi dalam inovasi, pengembangan model bisnis model Kerjasama perdagangan antar daerah, serta strategi lainnya.

Masyarakat juga berperan dalam menjaga inflasi dengan tidak melakukan pembelian sembako secara berlebihan, Misalnya, jika harga bawang putih melonjak karena penurunan produksi kemudian masyarakat panik membeli dalam jumlah besar justru dapat mendorong kenaikan harga lebih tinggi karena tingginya permintaan. Oleh karena itu, penting untuk berbelanja secara bijaksana karena pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya menjaga inflasi sesuai target.

2.1.8 Teori Klasik

Teori Klasik umumnya berpendapat bahwa tingkat harga yang berlaku dalam masyarakat pada dasarnya ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Kalau jumlah uang beredar, nilai uang merosot, dan harga-harga naik. Jadi inflasi berarti banyak uang beredar. Maka, obatnya jelas pula: membatasi jumlah uang



dan kredit. Pandangan klasik tersebut dewasa ini muncul kembali dalam pandangan Monetarisme yang di ajukan oleh Friedman yang berpendapat bahwa seluruh kegiatan ekonomi nasional ditentukan dan diatur jumlah uang beredar. Jadi, fluktuasi dalam kegiatan ekonomi dan dalam tingkat harga ditentukan oleh, dan dijelaskan dari perubahan-perubahan dalam jumlah uang dan kredit yang beredar. Hal ini di sebabkan oleh bankir yang terlalu murah hati memberikan kredit kepada para pengusaha dan pemerintah yang terlalu banyak mengeluarkan uang. (Rosyidi, Suherman, 2014)

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan PDRB berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena ketika PDRB meningkat, biasanya disertai dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Seperti halnya teori *Peacock dan Wisemen* (dalam Mangkosoebroto, 2010) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatnya penerimaan pajak dapat membiayai pengeluaran pemerintah.

Hubungan PDRB terhadap daerah mempunyai dampak positif yang berasal dari aktivitas perekonomian di 9 sektor ekonomi yang berbeda di daerah tersebut. Jika aktivitas ekonomi di sektor-sektor ini mengalami kenaikan, secara tidak langsung akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut karena beberapa sektor domestik dapat dijadikan indikator untuk mengukur atau mengestimasi peningkatan PAD secara langsung. Seperti dalam penelitian yang

oleh Afdhal, et, al (2021) yang menyimpulkan bahwa peningkatan PDRB



berbanding lurus dengan peningkatan PAD yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berkontribusi pada pendapatan daerah.

2.2.2 Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau Negara serta mematuhi peraturan di wilayah tersebut. Besarnya pendapatan asil daerah dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat.

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi barang dan jasa juga meningkat yang berpotensi meningkatkan penerimaan dari pajak yang merupakan komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah. Jumlah penduduk yang besar juga dapat meningkatkan tenaga kerja yang tersedia dan dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Peningkatan produktivitas ini dapat menghasilkan lebih banyak peneriaan pajak dan retribusi yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sementara Khusaini dalam Susanto (2014) menyebutkan bahwa, peran pajak dalam Pendapatan Asli Daerah dan pembiayaan daerah sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan signifikan dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengelola perekonomian



Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu daerah dapat memberikan positif terhadap perekonomian namun harus didukung dengan akan modal yang pada waktu tertentu akan secara langsung

mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui pengenaan pajak dan retribusi yang diperoleh pemerintah daerah dari masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Asmuruf M. (2015), bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka Pendapatan asli Daerah akan meningkat.

2.2.3 Hubungan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Mankiw (2006) menjelaskan bahwa inflasi memiliki dampak pada pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah mengeluarkan dana untuk membeli barang dan jasa untuk pekerja pemerintah serta kepentingan publik, dan juga untuk pembayaran transfer kepada kelompok miskin dan lansia. Pemerintah membiayai pengeluarannya melalui tiga acara yakni, meningkatkan penerimaan pajak seperti pajak penghasilan individu dan perusahaan, meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah dan mencetak uang.

Inflasi yang tinggi dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan, selain itu juga dapat mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara penelitian Damanik & Panjaitan (2022) menyimpulkan bahwa secara parsial, inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar.



2.3 Tinjauan Empiris

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut pendapatan asli daerah. Hal ini didasari agar dalam penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi pembanding dalam penelitian. Oleh karena itu, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayza (2015) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh” dengan hasil penelitian berdasarkan Uji F membuktikan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05. Uji T menunjukkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Sedangkan rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf M. F, (2015) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong dalam hal ini Pembangunan perekonomian masih sangat kecil dan diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Caesar Muslim, et. al. (2019) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Inflasi terhadap Pendapatan Asli Kota Kendari” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota



Kendari. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

Penelitian yang dilakukan oleh Damanik D. dan Panjaitan P. D. (2022) yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Pematangsiantar, sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Pematangsiantar. Secara simultan, Retribusi Daerah dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Pematangsiantar. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,817 atau sama dengan 81,70%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 81,70% PAD yang terjadi dapat dijelaskan variasi dengan menggunakan variabel Retribusi Daerah dan Inflasi, sisanya 18,30% dijelaskan oleh variabel lainnya.

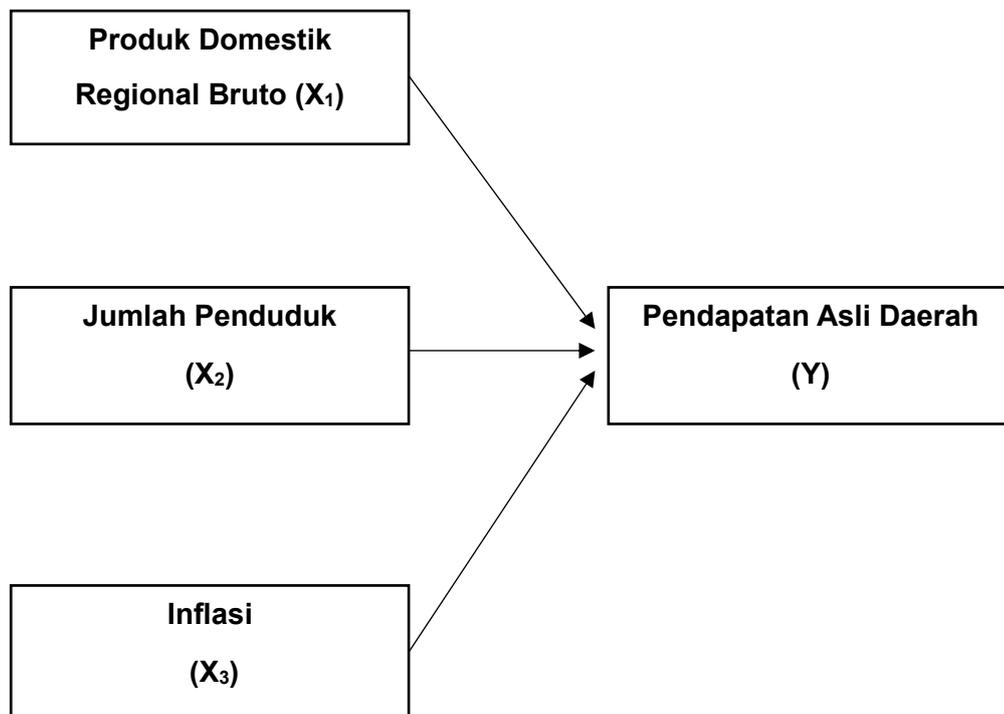
Penelitian yang dilakukan oleh Sarmila et. al. (2024) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (Uji T), variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan, Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan, dan variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian hasil dari Uji F (secara simultan), PDRB, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta pustaka di atas, maka disusunlah kerangka proses berfikir. Kerangka proses berfikir dimaksudkan untuk memberikan tuntunan berfikir deduktif melalui teori yang ada, karena tinjauan teori mempunyai kajian yang bersifat umum yang dapat dipakai pada kasus-kasus khusus.

Agar dapat lebih memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, maka dikemukakan gambar kerangka pikir yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
2. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
3. Diduga bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

